

**HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA JUAL BELI SINGKONG
PADA PENGEPUL**

(Studi Kasus di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Amir Firmansyah

NPM: 1621030367



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2021M**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA JUAL BELI
SINGKONG PADA PENGEPUK**

(Studi Kasus di Desa Gunung Besar kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H, M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Jual beli Singkong antara petani dan pengepul yang ada di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara. dengan sistem petani menjual hasil panennya melalui pengepul dan tidak secara langsung dijual ke pabrik pengola singkong. Pabrik memang tidak menerima pembelian secara langsung pada petani tapi melalui pengepul. Dalam kegiatan jual beli singkong antara petani dan pengepul di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara, terjadi praktik yang tidak wajar dengan pemotongan harga (*rafraksi*) sepihak dan cenderung merugikan petani. Penetapan harga antara pengepul dan petani singkong ditetapkan berdasarkan kualitas singkong yang dijual petani, harga ditetapkan pengepul berdasarkan harga yang ditetapkan pabrik untuk pengepul. Semakin rendah kualitas singkong, maka semakin rendah juga harga jual yang diterima petani. Permasalahan skripsi adalah bagaimana sistem penentuan harga dalam jual beli singkong antara petani dengan pengepul di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara ?, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penentuan harga dalam jual beli singkong antara petani dengan pengepul dimaksud ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli singkong pada pengepul dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riset*). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah induktif yakni penelitian data yang diperoleh bersifat khusus dan digunakan untuk membangun wawasan dan pengertian yang bersifat khusus. Adapun sumber data penelitian ini adalah petani, pengepul singkong dan pihak pabrik. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa adanya pengenaan pemotongan harga (*rafaksi*) secara sepihak oleh pengepul. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah jual beli tersebut tidak sah karena penetapan harga didasarkan atas penetapan singkong secara sepihak sehingga petani (penjual) tidak rela atau ikhlas.

Kata kunci : Petani, Pengepul, Penetapan Harga.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

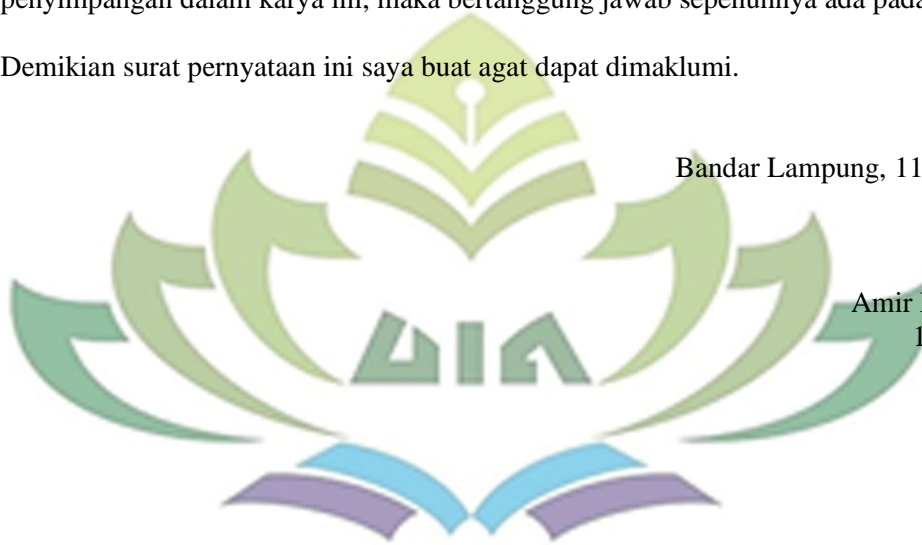
Nama : Amir Firmansyah
Npm : 1621030367
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Sinkong Pada Pengepul (Studi di Desa Gunung Besar, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agat dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 April 2021

Amir Firmansyah
1621030367





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

SURAT PERSETUJUAN

Nama : Amir Firmansyah
NPM : 1621030367
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
**Judul : HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HARGA
JUAL BELI SINGKONG PADA PENGEPUL (Studi Kasus
di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung
Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M. H.
NIP.195802011986031002

Pembimbing II

Etika Rini, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Singkong Pada Pengepul (Studi Kasus di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara) NPM: 1621030367, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah).** Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Hukum Ekonomi Syariah pada Hari Kamis, 01 Juli 2021 pukul 11.00 s.d 13.00 WIB, tempat : Ruang Sidang II Fak. Syariah

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

: Dr. Ghandi Liyorba Indra, M. Ag.

Sekretaris

: Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

Penguji Utama

: Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji Pendamping I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji Pendamping II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG



Dr. H. Khairuddin., M.H.

NID. 0162102199930311002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’ (4) : 29



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis kripsi ini persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Amrullah B.S dan ibunda Zanaria yang selalu memberiku doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan dukungan.
2. Untuk ayuk ku Eka Purnama sari, kakaku Wiryawan Aji Pranata, adikku Arif Budiman serta seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Raden Intan Lampung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Amir Firmansyah,. Lahir di Ogan Lima, tanggal 11 Maret 1996. Riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut :

1. TK Dharma Wanita Tahun 2001/2002 Kab. Lampung
2. MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 2007/2008 Kab. Lampung
3. MTS (Madrasah Tsanawiyah) tahun 2010/2011 Kab. Lampung
4. KMI (Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia tahun 2015 M /1435H,
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada Juli tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Singkong Pada Pengepul (Studi Kasus di Desa Gunung Besar, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, Keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ungkapan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. yang selalu memberikan Motivasi kepada seluruh Mahasiswanya
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Dr. Khairuddin, M.H., senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Ketua Jurusan Muamalah dan Sekjur Muamalah UIN Raden Intan Lampung Khoiruddin, M.S.I, Juhrotul Khulwah, M.S.I. yang telah memberikan kemudahan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I, Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., dan Pembimbing II Eti Karini, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan dan membantu dan meluangkan waktunya agar Skripsi ini selesai;
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah berjuang membantu dan memberikkan kenyamanan selama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, buku-buku, yang bermanfaat membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta.

Lebih baik menyempurnakan ketimbang harus mencari yang sempurna itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Sehingga diharapkan kiranya diberi masukan dan saran-saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keIslamaan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandarlampung, 11 April 2021

Penulis,

Amir Firmansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	1
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Tinjauan Pustaka.....	4
H. Metode Penelitian.....	5
I. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam.....	9
1. Pengertian dan dasar Hukumnya.....	9
a. Pengertian Jual Beli.....	9
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	10
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	12
a. Rukun Jual Beli.....	12
b. Syarat Jual Beli.....	13
3. Macam-macam Jual Beli.....	15
4. Hal-hal yang dilarang Dalam Jual Beli.....	16
B. Penetapan harga	18
1. Penetapan Harga secara Umum	18
2. Penetapan Harga secara Islam.....	18
3. Hal-hal yang harus dipertimbangkan Dalam Menetapkan Harga.....	20
C. Tentang Akad	22
1. Pengertian Akad.....	22
2. Rukun dan Syarat Akad.....	22
a. Rukun Akad.....	22
b. Syarat Akad	23
3. Syarat Objek Akad.....	25
4. Akibat Hukum Akad.....	26

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.....	27
B. Profil Pelaku Jual Beli.....	28
1. Pengepul.....	28
2. Petani.....	32
C. Sistem Penentuan Harga Jual Beli Singkong di Desa Gunung Besar K Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.....	33
D. Pengaruh Organisasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang terdapat di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.....	36

BAB IV : ANALISA DATA

A. Sistem Penentuan Harga Jual Beli Singkong antara Petani dengan Pengepul di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.....	39
B. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Penentuan Harga Dalam Jual Beli Singkong.....	40

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Rekomendasi.....	46

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN :

**HASIL WAWANCARA
SURAT VALIDASI INSTRUMEN
FOTO LOKASI
BIODATA PENULIS**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut mengenai penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu pemahaman istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul dari skripsi ini adalah **Hukum Ekonomi Islam Tentang Harga Jual Beli Singkong Pada Pengepul** (Studi Kasus di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab.Lampung Utara). Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan terkait judul adalah sebagai berikut ;

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan dari Allah SWT, yang berupa perintah anjuran kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum. Seperti larangan untuk mengambil riba dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli, tidak hanya berhenti pada pembahasan hukum-hukumnya tetapi jga membahas mengenai ketentuan-ketentuannya dalam bertransaksi.¹
2. Jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual-beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, dan uang dengan uang². Adanya jual beli tersebut memunculkan penentuan harga, menurut penulis sendiri penentuan harga dari jual-beli yakni pelaksanaan terhadap pemilihan barang untuk menentukan nominal dari barang tersebut.
3. Pengepul adalah suatu kelompok atau badan usaha yang mengumpulkan suatu barang dari beberapa orang untuk dijual kembali kesuatu tempat.³
4. Singkong adalah tanaman perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku *euphorbiaceae*.⁴ Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dari judul skripsi adalah untuk mengkaji Bagaimana Sistem Penetapan Harga dan Pandangan Ekonomi Syariah antara Petani dengan Pengepul di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab.Lampung Utara.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih judul Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Singkong Pada Pengepul (Studi Kasus di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab.Lampung Utara) sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
 - a. Penentuan harga dalam jual beli sekarang ini, banyak yang menentukan harganya masing-masing sehingga menimbulkan penetapan harga yang berbeda dalam praktik jual beli dengan objek sama, seperti penetapan harga singkong. Disisi lain tidak adanya aturan yang mengatur penentuan minimal dan maksimal keuntungan.

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 5.

² Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 100.

³ Eka Purnamasari, wawancara dari salah satu pengepul singkong, Desa Gunung Besar pada tanggal 12 Februari 2020

⁴ Euphorbiaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga.

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/ketela_pohon.

- b. Di lokasi penelitian penulis (Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara) penetapan harga jual beli singkong di tetapkan sepihak oleh si pengepul, sebagai petani singkong (penjual) merasa di rugukan dengan harga yang ditentukan pengepul secara tidak wajar.
2. Alasan Subjektif
 - a. Judul Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Singkong Pada Pengepul, judul tersebut sesuai dengan keilmuan yang penulis pahami dan pelajari,
 - b. Judul skripsi ini belum ada yang membahas, untuk penyelesaian penulis, data dan refrensinya mudah di peroleh, guna memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

C. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup dapat ditegakan nilai-nilai keadilan.⁶ Islam memiliki dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing masing saling membutuh kan antara satu dengan yang lainnya, supaya mereka tolong menolong, seperti tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau dengan cara yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk ke maslahatan umum.⁷ Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Oleh karena itu, Agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya kegiatan bermuammalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberi keuntungan dan kepuasan bagi setiap orang, dan tidak terjadinya perbantahan atau dendam-mendemdam tidak akan terjadi.

Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.

Dalam Islam Jual-beli dikenal dengan istilah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli)⁸ Jual-beli dalam syariat Islam memiliki arti "pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang yang lainnya atas kesepakatan bersama, dalam jual-beli menurut Islam sangatlah sederhana pada umumnya yang harus terpenuhi ialah rukun dan syaratnya."⁹

Dalam beberapa hal tertentu adanya syarat atau ketentuan dan syarat bagaimana hal itu dapat dijalankan, begitupun ketika mengacu pada kegiatan jual-beli beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya dapat sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Islam jual-beli atau *al-bai'* memiliki status hukum diperbolehkan. Adapun syaratnya yakni masing-masing pihak dalam

⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 65.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 61.

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet.2 (Prenada media: Jakarta, 2005) , 81.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 79.

perjanjian tersebut sama-sama menyetujui kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan, jika terdapat unsur paksaan maka kegiatan jual-beli tersebut dianggap tidak sah.¹⁰

Penentuan harga termasuk kedalam akad jual-beli *al-bai'* yang biasanya berlaku dalam beberapa hal yang melibatkan antara penjual dan pembeli, pedagang dan pembeli petani kepada pengepul dan konsumen terhadap produsen yang memerlukan tukar menukar suatu barang dengan uang maupun barang dengan barang.¹¹

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli hasil pertanian. Jual beli hasil pertanian pun beragam, ada hasil pertanian buah, hasil pertanian jagung, hasil pertanian singkong dll. Adapun hasil pertanian singkong merupakan salah satu hasil komoditi pertanian yang biasanya dipakai sebagai bahan makanan, dan juga dapat dipakai sebagai bahan industri.

Mekanisme jual beli Singkong antara petani dan pengepul yang ada di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara. Yakni dengan sistem petani menjual hasil panennya melalui pengepul dan tidak secara langsung di jual ke pabrik yang mengolah singkong, yang mana pabrik disini memang tidak menerima penjualan secara langsung oleh petani dan harus melalui pengepul, dikarenakan keterbatasan pekerja dan tempat di pabrik.

Dalam kegiatan jual beli singkong antara petani dan pengepul yang ada di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara, terdapat kesenjangan yang tidak wajar dikarenakan para pengepul mengambil keuntungan terlalu banyak, yang mana pengepul menetapkan harga sepihak dan cenderung merugikan petani. Penetapan harga jual-beli antara pengepul dan petani singkong ini ditetapkan berdasarkan kualitas singkong yang dijual oleh petani, hal itu ditetapkan sendiri oleh pihak pengepul berdasarkan harga yang ditetapkan pabrik untuk pengepul, begitu juga pengepul ke pabrik singkong untuk diolah kembali, pabrik menentukan harga berdasarkan kualitas singkong, semakin rendah kualitas singkong yang dijual oleh petani maka semakin rendah harga jual yang diterima oleh petani.

Dalam kegiatan ini keuntungan yang paling besar yakni pengepul karena mengambil singkong kepada petani dengan harga yang telah mereka tetapkan, tapi dalam praktik jual-beli penetapan harga jual petani ke pengepul sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pengepul yang mana harga jual singkong tersebut dapat berubah tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara petani dengan pengepul yang ada di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap penetapan harga dalam praktik jual-beli singkong antara petani dengan pengepul apakah dalam praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang menjadi kajian judul skripsi penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem Penentuan Harga Dalam Jual Beli Singkong antara Petani dengan Pengepul di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab.Lampung Utara?

¹⁰ Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 88.

¹¹ *Ibid* ,170.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Penentuan Harga Dalam Jual Beli Singkong antara Petani dengan Pengepul dimaksud?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian mempunyai tiga macam tujuan yaitu: penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan, berarti data dari penelitian yang dimulai dari permasalahan sampai temuan adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Pembuktian, berarti penelitian sampai hasil atau temuan penelitian bersifat menguji atau membuktikan, jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain atau dalam waktu yang berbeda. Pengembangan, berarti tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada.¹² Berdasarkan dari rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem Penentuan Harga Dalam Jual Beli Singkong antara Petani dengan Pengepul di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab.Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penentuan Harga Dalam Jual Beli Singkong antara Petani dengan Pengepul dimaksud.

F. Manfaat Penelitian

Signifikasi penelitian biasanya berasal dari masalah penelitian yang diidentifikasi dalam literatur yang ada maupun pengalaman praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, kegunaan yang dapat diklasifikasikan secara Teoritis dan secara Praktis.¹³ Adapun signifikasi yang peneliti harapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran serta dapat memperluas ilmu pengetahuan Keislaman yang terkait dengan penelitian dan bermanfaat di masa perkembangan Islam yang akan datang dalam permasalahan penentuan harga dalam jual beli singkong antara petani dan pengepul.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksud guna memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan Penulis teliti, dan bertujuan agar menghindari plagiasi. Berikut penjabaran beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek yang akan diteliti Penulis :

Pertama, Szasza Jalawida, 2019 yang berjudul Penetapan Harga Terhadap Jual-Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam, dalam skripsi ini menjelaskan tentang penetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak penjual dengan mengandung unsur kesamaran atau ketidakadilan antara pembeli satu dengan lainnya. Hal ini terjadi dimana rumah makan tersebut telah mencantumkan harga, namun harga yang dibayar tersebut justru harganya tidak sesuai dan jauh lebih mahal dari yang tercantum oleh rumah makan tersebut, dengan alasan pembeli makan ditempat dan dibungkus berbeda, sedangkan pada umumnya yang menjadi pembea adalah lauk yang kita makan.

¹² Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010), 3.

¹³ *Pedoman Penelitian Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian risetnya didasarkan pada data yang bersumber dari wawancara pemilik rumah makan yang menggunakan sistem prasmanan dalam praktik jual-belinya.¹⁴

Kedua, Maulidah Syari'ah, 2017, Penelitian ini berjudul Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini menjelaskan petani rumput laut yang pasrah akan penetapan harga yang ditetapkan oleh pembeli atau pengepul sehingga hal tersebut menjadi adanya monopoli sistem jual beli rumput laut dan seharusnya petani yang menetapkan harga. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Data-data yang diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.¹⁵

Ketiga, Sovi Nur Aisyah, 2015, Penelitian ini berjudul Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, penelitian ini membahas tentang mekanisme penetapan harga jual pada sebuah toko yaitu nominal melebihi keuntungan yang sewajarnya. Toko tersebut mengambil keuntungan dari hasil pembulatan harga yang ganjil dibulatkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni mengumpulkan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan atau observasi wawancara, dengan objek toko yang ditentukan oleh penulis peneliti ini.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya dan selanjutnya dicari penyelesaiannya.¹⁷ Guna memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun informasi baik itu kata tertulis maupun dari ucapan atau penyampaian dari oranglain ataupun masyarakat. jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi objek penelitian. Penelitian ini bersifat induktif dimana dalam penelitian data yang diperoleh bersifat khusus dan digunakan untuk membangun wawasan dan pengertian yang bersifat umum.¹⁸

¹⁴ Szazsa Jalawida, "Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam".(Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 3.

¹⁵ Maulidah Syar'iah , "Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syria'ah ".(Skripsi Program Sarjana Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2017), 1.

¹⁶ Maulidah Syar'iah , "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syria'ah ".(Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon , 2017), 1.

¹⁷ Jogo Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta 1994), 2.

¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RD* (Bandung: Maret 2008), 5.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan perlengkapan sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu pengepul dan petani singkong yang ada di Desa Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab.Lampung Utara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku, majalah-majalah, refrensi yang lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini, dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak terkait.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti.²⁰ Seperti yang telah peneliti tetapkan dalam memperoleh data tentang penentuan harga jual beli singkong antara pengepul dengan petani, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni pengepul dan petani yang ada di Kec.Abung Tengah, Lampung Utara, yang keseluruhannya berjumlah 290 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non random sampling* yakni teknik mengambil sampel dengan tidak secara acak, melainkan berdasarkan atas pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu.²¹ Dalam penelitian ini sampel yang diambil yakni para pengepul dan petani singkong yang ada di daerah Abung Utara, yang keseluruhannya berjumlah 290 orang.

4. Pengumpulan Data

Keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian tersebut, dan membutuhkan dari berbagai sumber. Data dalam suatu penelitian merupakan inti tanpa adanya data tidak ada sebuah permasalahan dan penyelesaiannya.²²

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara suatu metode pengumpulan data yang sering digunakan pada banyak penelitian Kualitatif. Wawancara dapat juga dilakukan antara penlitit dengan seorang informan.²³

¹⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 84.

²⁰ Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif edisi revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 66.

²¹ *Ibid*, 81.

²² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta; 2007), 86.

²³ Martono Nanang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo;2014), 84.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu catatan yang tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa tertentu, termasuk dokumen monografi dan demografi yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Metode yang digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lainnya.²⁴

5. Pengolahan Data

a. *Editting* (Pemeriksaan Data)

Editting adalah tehnik pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena akan ada kemungkinan data yang masuk atau dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan, dengan tujuannya yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dengan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dengan sebenar-benarnya.²⁵

b. *Sistemating*

Sistemating adalah pengecekan data terhadap bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang telah didapatkan.²⁶

6. Analisa Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode analisis deskriptif analisis, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, yakni bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang jual beli singkong antara petani singkong dengan pengepul, yang didapat dengan cara mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kemudian dianalisis dengan teori yang selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan analisis terhadap penentuan harga jual-beli antara petani singkong dengan pengepul yang ada di Abung Tengah, Lampung Utara.

Adapun metode berfikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode berpikir induktif dan deduktif. Metode berpikir induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah umum di lapangan mengenai fenomena yang diteliti, Metode berpikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.²⁷

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 88.

²⁵ *Ibid*, 90.

²⁶ Iqbal Hasan, *Metodologi Pengumpulan Data* (Bandung: Rajagrafindo Persada:2007), 58.

²⁷ Iqbal Hasan, *Metodologi Pengumpulan Data* (Bandung: Rajagrafindo Persada:2007), 60.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta penelitian terdahulu yang relevan dengan materi yang dibahas yakni jual beli singkong di pengepul.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai jual beli, teori dalam penetapan harga, teori mengenai perjanjian (akad). Teori-teori tersebut untuk menganalisis data pada bab III yang disajikan dalam Bab IV.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai penjelesan objek atau data yang akan dibahas, dengan maksud data primer yang dibutuhkan disajikan dalam bab ini, yakni gambaran umum mengenai letak wilayah, sistem jual beli yang menjadi topik utama, serta data-data pendukung lainnya akan disajikan dalam bab ini.

BAB IV : ANALISA DATA

Dalam bab ini data yang menjadi pembahasan dari hasil pengumpula data yang telah disajikan dalam Bab III akan dianalisa dengan teori pada bab II untuk mengetahui sistem jual beli singkong dan status harganya.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran atau rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Jual beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti :

مُقَا بَلَةً الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : *Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*²⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Fathir ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.*²⁹

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Definisi dalam arti umum yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya : *jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.*

- b. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu alah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak

²⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 139.

²⁹ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

- c. Menurut Imam Syafi'i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq Jual Beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli merupakan harus dipakai untuk mempertukarkan barang dan jasa serta agar masing masing pihak yang berakad dapat merealisasikan kebutuhanny. Allah SWT menyeru dengan Firman- Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharakan riba.³⁰

Jual beli merupakan muamalah kuno. Tidak seorang pun bisa hidup ditengah masyarakat manapun, kecuali jual-beli masuk dalam *Tasharruf*-nya. Jual- beli dinyatakan di dalam Al-Qur'an beberapa kali di beberapa tempat; kadangkala dinyatakan dengan makna jual-beli secara hakiki; kadangkala secara majazi. Jual beli memiliki banyak deskripsi.

Islam mensyariatkan jual beli dengan menetapkan hukumnya boleh, Rasulullah.SAW diutus dan masyarakat sama – sama memperjual belikan apa yang mereka butuhkan. Jual beli secara bahasa berarti pertukaran (*al-mubadalah*) yakni memberikan sesuatu sebagai kompensasi atas suatu yang lain.³¹

b. Dasar hukum jual beli

Dalam Q.S An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³²

³⁰ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* ..., 10.

³¹ *Ibid*, 106.

³² Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...,35.

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.³³ Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu :

1) Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharuskan riba.³⁴

2) Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)³⁵

³³ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'rif, (Bandung, 1997), 47.

³⁴ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..., 17.

³⁵ Abu Malik Kamal, *Shohih Fiqh As-Sunnah Wa Adillahu Wa Tadhih Madzahib Al- A'immah*. Terj. Khoirul Amru Harap, Shohih Fiqh Sunnah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), 420.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya (HR. Ibnu Majah)³⁶

3) Dasar Hukum Ijma'.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

2. Rukun dan Syarat jual beli

a. Rukun Jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴⁰

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 'aqid

- i. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- ii. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.

b) *Shighat* (ijab dan qabul) *mahal al-'aqdi* yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴¹ Ijab merupakan perkataan penjual seperti *saya menjual* dan Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁷

³⁶ Ibid, 422.

³⁷ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...,34.

Qabul adalah perkataan pembeli, seperti *saya beli dengan harga sekian*.³⁸ Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*” secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’

c) Ada barang yang dibeli *Ma’qud a’alaih* Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma’qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁴²

d) Ada nilai tukar pengganti barang Nilai tukar pengganti barang *Maudhu ‘Al-aqdi* yaitu Tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan atau sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴³

b. Syarat Jual Beli

Al-Muta’qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, *jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah*.

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas : *orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya)*.³⁹

b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW:

³⁸ *Ibid*, 125.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta , 2000), 115.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Majjah).⁴⁰

Yang artinya bahwa jual beli itu tidak ada paksaan dan saling merelakan antara pihak penjual dan pembeli agar tidak ada rasa ketidakridhoan atau ketidakikhlasan dari pihak penjual dan pembeli.

c. Saling mengetahui

Artinya pihak penjual dan pembeli harus saling mengetahui kejelasan barang dan harga jual, apakah barang cacat, terdapat kekurangan dari barang tersebut, dan harga yang tepat apabila ada kecacatan dalam barang yang diperjual-belikan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴¹

Yang artinya bawah penjual dan pembeli harus saling mengetahui kejelasan barang jika tidak itu merupakan suatu bentuk perjudian. Dan didukung hadits riwayat Ibnu Mas'ud ra :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُرٌ

Artinya : Janganlah kalian membeli ikan didalam air karena ini adalah jual-beli yang tidak jelas.⁴²

Dan Rasulullah SAW pun melarang karena tidak dapat ditentukan nilainya, tidak diketahui kualitasnya, maupun kuantitasnya.

d. Suci barangnya

Barang yang diperjual-belikan tidak mengandung najis dan bukan barang haram atau barang yang dilarang dalam agama untuk diperjual-belikan.

e. Barang bermanfaat.

Artinya barang yang diperjual-belikan bermanfaat dan tidak mubazir.

f. Barang sudah dimiliki

⁴⁰ Ibid, 120.

⁴¹ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..., 54.

⁴² Ahmad Wardi, *Fiqih muamalah* , (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), 285.

Penjual sudah memiliki hak menjual barang, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual dari pemilik barang.

g. Barang dapat diserahkan.

Artinya penjual harus bisa dapat memberikan barang yang dijual, jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian dalam satu pihak.

h. Lafadz dan perbuatan harus jelas.

Artinya penjual ataupun pembeli harus jelas dalam bertransaksi, agar tidak ada kekeliruan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

3. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya sah dan telah mengikat kedua belah pihak.

b. jual beli yang batil

Yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

c. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.

d. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori bai'al-garar(jual beli tipuan).

e. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan.

Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus, dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli al-hissah. Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-mulamasah (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli al-

muzabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.

f. Jual beli benda-benda najis.

Seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

g. Jual beli al-arbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.

Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

h. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.

i. Jual beli yang fasik

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu meyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli batil. Apabila syarat dan rukun jual terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

j. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

Transaksi jual beli yang barangnya tidak berada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.

k. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya

Diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.

4. Hal-hal yang dilarang Dalam Jual Beli

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁴³

Dalam jual-beli ada hal-hal yang dilarang yakni antara lain :

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.⁴⁴
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴⁵
- f. Jual beli secara “*arbun*” yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁴⁶
- g. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁴⁷
- h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Muthafifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*⁴⁸

Dan sebagaimana hadist Nabi yang menjelaskan jual beli yang tidak diketahui ukurannya atau tidak transparannya dalam menimbang ukuran :

⁴³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

⁴⁴ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38.

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

⁴⁶ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

⁴⁷ Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

⁴⁸ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...,56.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكَّابِ خِزَافًا فَتَهَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى نُنْقِلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : “Dari Ibnu Umar R.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda. “Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga dia menerimanya (terlebih dahulu) dengan sempurna.” Kemudian Ibnu Umar berkata, “Dahulu kami pernah membeli makanan dari para kafilah (yang mengendarai unta) dengan perkiraan (tanpa ditimbang dan ditakar). Setelah itu Rasulullah Saw melarang kami untuk menjualnya kembali sampai kami memindahkan barang tersebut dari tempatnya.” HR. Muslim ⁴⁹

- j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

B. Penetapan Harga Dalam Islam

Menjalankan sebuah bisnis jual-beli tidak akan terlepas dari permasalahan harga. Harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jual-beli dari produsen ke tangan konsumen. Melalui penetapan harga, akan terlihat posisi kelayakan produk dari nilai ekonomisnya. Oleh karena itu, dengan permasalahan ini perusahaan biasanya mengadakan penetapan harga yang disepakati sebelum barang beredar di pasaran.

1. Pengertian Penetapan Harga Secara Umum

Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode *pricing* dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. *Pricing* bergantung pada harga rata-rata perusahaan, dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang, dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing.

Setiap pelaku bisnis memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan. Saat menetapkan biaya produk dan layanan, hal berikut harus dipertimbangkan:

- 1) Identitas barang dan jasa
- 2) Biaya barang dan jasa serupa di pasar
- 3) Audiens sasaran untuk siapa barang dan jasa diproduksi
- 4) Total biaya produksi (bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin, transit, biaya persediaan, dll).
- 5) Elemen eksternal seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan, ekonomi,

2. Pengertian Penetapan Harga Secara Islam

- 1) Penetapan Harga Ibnu Khaldun

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*..., 206

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat ialah harga akan naik. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁵⁰

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya naik. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁵¹

2) Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya Al-Kharaj, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.⁵² Abu Yusuf menyatakan, 'tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.⁵³

3) Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai 'harga yang berlaku', seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.⁵⁴ Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan

⁵⁰ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), 223.

⁵¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 361.

⁵² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam; pendekatan teoritis*, Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), 231.

⁵³ Adiwarmman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

⁵⁴ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290.

produk makanan adalah inelastic, karena makanan adalah kebutuhan pokok.⁵⁵ berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.⁵⁶

4) Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al-adl). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majwufatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.⁵⁷ Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.⁵⁸ Ia mengatakan, jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghai'ri haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁵⁹ Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-'Adl*).⁶⁰

3. Hal-Hal yang harus dipertimbangkan Dalam Menetapkan Harga

Ada berbagai cara menetapkan harga dalam jual-beli. Namun tidak ada rumusan yang sama yang dapat diterapkan di setiap jenis produk, model usaha, dan target pasar. Dalam menetapkan harga, biasanya faktor-faktor inti seperti target pasar yang dituju, harga yang

⁵⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

⁵⁶*Ibid*, 228.

⁵⁷*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

⁵⁸A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Anshari Thayib, (Jakarta:PTBina IlmuOffset, 1997), 12.

⁵⁹*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam....*, 332.

⁶⁰Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam....*,210.

ditentukan pesaing, serta hubungan antara kualitas dengan harga menjadi pertimbangan penting. Ada dua poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, bila menetapkan harga terlalu rendah, maka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Harga yang terlalu rendah juga akan mempengaruhi kegiatan produksi. Banyak penjual yang menerapkan strategi harga rendah agar produk/jasanya diminati banyak konsumen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan. Namun, harga rendah belum tentu dipersepsikan pembeli dengan harga “murah”. Poin kedua, jika menentukan harga terlalu tinggi, maka pembeli yang sensitif harga akan meninggalkan barang kita dan memilih barang pesaing. Jadi yang lebih penting adalah melihat kemampuan daya beli konsumen yang dituju. Untuk itu survei untuk mengetahui harga yang dianggap wajar perlu dilakukan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga adalah:

1. Menentukan berapa pendapatan yang ingin dihasilkan dari barang tersebut.
Besarnya pendapatan disini artinya menghasilkan pemasukan dimana uang tersebut tidak hanya untuk menutupi berbagai biaya yang muncul tapi juga mendapatkan profit yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Kesalahan yang jamak terjadi ialah penjual menganggap tingkat penjualan hanya ditentukan oleh harga semata. Padahal besarnya penjualan sangat tergantung pada pemilihan konsumen dan strategi penjualan yang tepat.
2. Menentukan prioritas usaha
Meningkatkan pasar melalui barang yang kita hasilkan. Yakni adalah produk harusnya dikenal karena berkualitas, bukan hanya karena harga murah semata.
3. Mempertimbangkan kemampuan konsumen.
Dalam menentukan harga, penjual yang baik akan menggunakan berbagai alat dan faktor untuk mengukur kemampuan pembeli. Semakin tahu kondisi pembeli yang dituju, maka akan semakin tahu pula berapa harga jual yang bisa dipatok. Melakukan survei berdasar demografis dan barang apa saja yang biasa di beli adalah jenis riset yang dapat membantu memberikan gambaran berapa harga yang mestinya ditentukan.
4. Biaya Produksi.
Besarnya biaya produksi juga menjadi dasar penentuan harga yang tentu saja ditambah dengan profit yang diinginkan. Misalnya, jika kita membuat barang dengan biaya keseluruhan Rp.10.000 dan keuntungan yang diharapkan Rp. 2000, maka barang tersebut dijual dengan harga Rp. 12.000. Perlu juga dicatat bahwa biaya sebuah barang tidak hanya yang nampak, tapi juga termasuk biaya overhead.
5. Sesuai dengan target awal.
Menetapkan target pendapatan juga merupakan bagian penting dalam menetapkan harga. Faktor yang menentukan harga produk diantaranya, biaya produksi, biaya pemasaran, dan promosi.
6. Mengetahui harga kompetitor.
Mengetahui harga kompetitor bisa jadi membantu kita dalam menentukan harga jual produk Misalnya, apakah produk kompetitor sebanding dengan produk kita. Jika iya, maka harga kompetitor tersebut kita jadikan patokan. Perhatikan pula apakah produk

yang kita hasilkan memiliki added value dibandingkan dengan produk pesaing. Misalnya; adanya garansi pembelian dan layanan purna jual.

7. Monitor harga.

Setelah harga ditentukan, maka memonitor harga secara berkelanjutan harus dilakukan karena harga juga menentukan tingkat keuntungan yang didapatkan.

C. Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*⁶¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku sabri samin menjelaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan.⁶²

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUHPdata. Sedangkan istilah *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.⁶³

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Menurut mayoritas ulama, rukun akad ada tiga:

1) Shighat

Shighat adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis).

Syarat shighat :

- Maksud Shighat itu harus jelas dan bisa dipahami. Artinya ada keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi.
- Ada kesesuaian antara Ijab dan Qabul.
- Ijab dan Qabul dilakukan berturut-turut. Artinya dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak menyatakan ketidaksetujuan terhadap isi ijab.

⁶¹ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...,17.

⁶² Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. I, (Makassar: alauddin university Press, 2012), 271.

⁶³ Muhammad Firdaus (ed.), *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), 13.

d) Keinginan untuk melakukan akad saat itu, bukan pada waktu mendatang.

2) Pelaku Akad (*'Aqidan*)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.

Syarat pelaku akad :

a) *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Terbagi dua, yaitu *Ahliyah wujub*, pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. *Ahliyah 'ada* yaitu berkompoten untuk melaksanakan akad sesuai syariah.

b) *Wilayah* yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syar'i yaitu sudah mukallaf (aqil baligh, berakal sehat, dan dewasa/cakap hukum).

3) Objek Akad (*Ma'qud 'Alaihi*)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat objek akad :

- 1) Barang yang masyru' (legal)
- 2) Barang bisa diserahterimakan saat akad.
- 3) Jelas diketahui oleh para pihak yang berakad.
- 4) Keempat, Harus ada pada waktu akad.⁶⁴

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.⁶⁵

Padangan tersebut menunjukkan, bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab Hanafi mengakui, bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur tersebut berada di luar akad sehingga dinamakan akad. Rukun hanya substansi internal yang membentuk akad yakni ijab dan kabul.

Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul, namun mereka mengakui tidak mungkin adanya akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Al-Zarqa dalam menyikapi perbedaan pendapat itu mengemukakan, bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur adalah rukun akad yaitu ijab dan kabul. Menurut al-Zarqa, empat unsur akad adalah (1) para pihak, (2) objek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad, sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak yaitu ijab dan kabul.

b. Syarat Akad

⁶⁴ Oni Sahroni (Ed.), *fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 78.

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad.

Syarat-syarat dalam rukun akad, adalah Rukun pertama, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak. Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.⁶⁶

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad, para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad, berlakunya akibat hukum, maupun kekuatan mengikat dari suatu akad. Kualitas akad dimaksud, adalah:

a. Syarat Keabsahan Akad

Rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna terhadap sahnya suatu akad. Rukun pertama dengan dua syarat terbentuknya; yaitu tamyiz dan berbilang pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua, yang salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumhur fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul harus dicapai secara bebas tanpa paksaan dan jika terjadi paksaan, akadnya fasid. Namun menurut ulama Hanafiah, bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan akad, melainkan syarat berlakunya akibat hukum.

Menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, menunggu retifikasi dari pihak yang dipaksa, jika paksaan itu telah berlaku.⁶⁷ Objek akad sebagai syarat ketiga dengan ketiga syaratnya memerlukan unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” membutuhkan unsur penyempurna, yakni penyerahan tidak menimbulkan kerugian, sedangkan syarat “objek akad harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna yakni tidak mengandung garar. Sedangkan syarat “objek akad harus dapat ditransaksi” memerlukan unsur penyempurna yakni harus bebas dari riba. Apabila unsur penyempurna syarat itu mengandung kerugian, garar, serta riba, akadnya menjadi fasid.

Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna, tetap dinyatakan sebagai akad fasid. Menurut ulama Hanafiah, akan fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Yang dimaksud di sini adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belumm memenuhi syarat keabsahannya.

b. Berlakunya Akibat hukum Akad

Ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya, belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya meskipun sudah sah. Kondisi sedemikian itu disebut akad maukuf (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya diperlukan dua syarat kewenangan, yaitu: *pertama*, adanya kewenangan sempurna atas objek akad, yakni para pihak mempunyai kepemilikan atas objek atau mendapat kuasai dari pemilik dan pada objek itu tidak tersangkut hak orang lain, seperti

⁶⁶ *Ibid*, 98.

⁶⁷ *Ibid*, 100.

sedang gadai, sewa, dan lain-lain. *Kedua*, adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya, para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum, baik kecakapan bertindak hukum minimal yakni mumayiz maupun kecakapan hukum yang sempurna yakni kedewasaan. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiah, Hanabilah, Malikiyah. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanabilah dan Syafi'iah, bahwa menjual milik orang lain tanpa izinnya adalah (hukum maukuf).⁶⁸

c. Kekuatan Mengikatnya Akad

Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, keabsahan, dan syarat berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya, sehingga dapat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali telah ada persetujuan para pihak tentang adanya alasan hukum yang membenarkan tindakan pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan pihak lain.

3. Syarat Objek Akad

Agar sebuah transaksi sah maka objek transaksi harus memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Barang tersebut adalah barang yang suci (bukan najis) atau terkena najis namun masih memungkinkan untuk dibersihkan. Oleh karena itu, transaksi dengan objek benda najis semisal bangkai tidaklah sah. Demikian pula, jika benda tersebut berlumuran najis dan tidak mungkin untuk dibersihkan semisal susu atau cuka atau benda cair yang lain ketika bercampur dengan najis. Jika memungkinkan untuk dipisahkan maka benda tersebut boleh menjadi objek transaksi.
- b. Benda tersebut bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat. Bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat adalah asas untuk menilai suatu benda itu termasuk harta ataukah tidak dan memiliki nilai ataukah tidak. Oleh karena itu benda-benda yang tidak ada manfaatnya semisal benda-benda remeh yang tidak dilirik orang tidaklah sah jika dijadikan sebagai objek transaksi. Demikian pula, jika manfaat benda tersebut adalah manfaat yang haram semisal manfaat yang terkandung pada khamr dan semacamnya tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi. Namun perlu diingat baik-baik bahwa status suatu benda bisa dimanfaatkan ataukah tidak itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Di masa silam barang rongsokan termasuk kategori benda tidak bernilai sehingga tidak sah jika dijadikan sebagai objek transaksi. Sedangkan di zaman sekarang barang rongsokan termasuk benda yang memiliki nilai jual.
- c. Bisa diserahkan. Oleh karenanya, benda yang tidak ada tidaklah dijadikan objek transaksi. Demikian pula benda yang ada namun tidak bisa diserahkan. Benda-benda ini tidak sah dijadikan sebagai objek transaksi karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Sedangkan setiap transaksi yang mengandung gharar itu terlarang dalam syariat.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Cet. 1 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

- d. Telah dimiliki dengan sempurna oleh orang yang mengadakan transaksi. Karenanya, benda yang tidak bisa dimiliki tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi.
- e. Benda tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengadakan transaksi dalam transaksi langsung. Atau benda tersebut diketahui kadar, jenis dan bentuknya dalam transaksi tidak langsung. Jadi dalam transaksi jual beli langsung, benda yang menjadi objek transaksi disyaratkan bendanya telah diketahui secara jelas semisal jual beli mobil tertentu atau rumah tertentu. Akan tetapi jika transaksinya tidak langsung semisal transaksi salam maka disyaratkan benda yang akan diterima oleh pembeli itu diketahui kadar, jenis dan bentuknya. Transaksi salam adalah seorang penjual yang menjual barang yang sudah jelas ciri-cirinya namun barang ini baru bisa diterima oleh pembeli setelah transaksi diadakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

4. Akibat Hukum Akad

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Seperti perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan *syara'*. Seperti terdapat cacat pada objek akad, atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁶⁹

Dalam hukum perjanjian Islam seperti halnya dalam hukum lainnya, pada dasarnya, akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain diluar mereka. Hal ini ditegaskan dalam kitab *mursyid al-Hairan*: Pasal 306 (1): Akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Pasal 278: Orang yang *baligh* dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain, barangsiapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah, dan bukan orang lain, yang terikat oleh hak-hak dan akibat - akibat hukum yang timbul dari akad tersebut.⁷⁰

Pihak-pihak yang membuat akad itu, adakalanya membuat akad atas namanya sendiri dan adakalanya membuat akad untuk dan atas nama orang lain, artinya ia mewakili kepentingan orang lain.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 51.

⁷⁰ Dalam hukum perjanjian Islam, suatu akad lazimnya dikatakan menimbulkan hak-hak akad dan hukum-hukum akad. Dengan hak-hak akad dimaksudkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul dari akad para pihak. Sedangkan hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) hukum pokok akad, yaitu tujuan bersama yang hendak dicapai melalui penutupan akad, seperti akad jual beli bertujuan melakukan transfer hak milik atas suatu benda dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan, dan (2) hukum-hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, yaitu hak dan kewajiban yang timbul dari akad pada masing-masing pihak. Jadi kata hukum-hukum akad sinonim dengan akibat-akibat hukum, lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 265.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Cet. 1, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Atmodjo Darso, *1001 Cara Bisnis Dengan Singkong*, Bandung: Buku Kita, 2003.
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Prenada media, 2005.
- Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)* ,Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Iqbal Hasan, *Metodologi Pengumpulan Data* .Bandung: Rajagrafindo Persada:2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* ,Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Media Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. I, Makassar: alauddin university Press, 2012.
- Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I* ,.Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif edisi revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, .Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam;pendekatan teoritis*, Cet-1, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008.

Oni Sahroni (Ed.), *fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Setijati dan Elizabeth, *Keanekaragaman Hayati Pertanian menjamin kedaulatan pangan*, Jakarta : Yudishtira, 2011.

Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam* , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cetakan ke-27,Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Cet. 1 ,Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.

Sumber Rujukan Online

Daftar Kecamatan Kabupaten Lampung Utara (On-Line), tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kabupaten_lampung_utara (03 februari 2020)

Sumber Wawancara

Eka Purnamasari, wawancara dari salah satu pengepul singkong, Desa Gunung Besar pada tanggal 12 Februari 2020